

Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Langsa (Studi Kasus UMKM Kota Langsa)

Dimas Nur Syawal¹, Puti Andiny², Rinaldi Syahputra³
^{1,2,3}Universitas Samudra, Indonesia

Article History:

Received: 29 Maret 2026

Revised: 14 April 2026

Accepted: 18 April 2026

Keywords:

Strategi
Pemerintah, Pemberdayaan
Ekonomi, UMKM, Kota
Langsa, Analisis SWOT.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Langsa. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis SWOT lalu menggunakan teknik Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Langsa menerapkan berbagai strategi, antara lain pelatihan peningkatan keterampilan pemasaran produk khas, pemanfaatan sektor pariwisata dan pasar lokal untuk menyerap tenaga kerja, pengembangan infrastruktur distribusi, penguatan branding dan kemasan produk, pelatihan rutin dalam bisnis dan digitalisasi, serta penggunaan media sosial dan marketplace sebagai sarana promosi. Selain itu, pemerintah juga mendorong inovasi produk dengan bahan alternatif, penerapan e-commerce dan QRIS, serta pembangunan pusat oleh-oleh khas Kota Langsa. Strategi-strategi ini secara signifikan mendorong peningkatan daya saing UMKM serta berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang melampaui 270 juta jiwa menghadirkan kompleksitas pembangunan ekonomi yang tinggi, baik dari sisi struktur ekonomi maupun distribusi kesejahteraan. Transformasi ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran, yang masih menjadi tantangan struktural dalam pembangunan nasional. Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika distribusi pendapatan tidak merata (Todaro & Smith, 2015).

Secara konseptual, pembangunan ekonomi dipahami sebagai suatu proses jangka panjang

yang ditandai oleh peningkatan pendapatan per kapita riil serta transformasi struktur ekonomi yang berlangsung secara berkelanjutan (Sukirno, 1994). Proses ini tidak hanya melibatkan akumulasi modal dan peningkatan output, tetapi juga perubahan institusional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan kapasitas produksi dan inovasi (Siwu, 2019). Namun demikian, negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural, antara lain keterbatasan modal, rendahnya kualitas tenaga kerja, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta persoalan institusional dan sosial budaya yang menghambat efektivitas pembangunan (Sukirno, 2007).

Dalam konteks tersebut, pemberdayaan ekonomi masyarakat (community economic empowerment) menjadi salah satu strategi kunci dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai intervensi ekonomi, tetapi sebagai proses transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan posisi tawar masyarakat dalam sistem ekonomi (Chambers, 1995; Narayan, 2002). Secara substantif, pemberdayaan merupakan proses pergeseran relasi dari objek menjadi subjek pembangunan, di mana masyarakat tidak lagi sekadar penerima kebijakan, tetapi menjadi aktor utama dalam proses pembangunan itu sendiri (Suhendra & Kadmasasmita, 2006; Aziz & Rahayu, 2020). Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merancang strategi yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Pada tingkat regional, variasi karakteristik ekonomi lokal menciptakan disparitas dalam tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi tidak akan optimal tanpa diiringi pemerataan distribusi pendapatan (Rahardja, 2008). Hal ini menguatkan argumen bahwa pembangunan ekonomi daerah harus berorientasi pada pengelolaan potensi lokal, penguatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan (Tumangkeng, 2018).

Provinsi Aceh sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menunjukkan dinamika yang menarik, di mana pendapatan per kapita mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, yang dalam literatur pembangunan sering dikaitkan dengan kegagalan mekanisme distribusi dan lemahnya intervensi kebijakan yang inklusif (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009). Dengan demikian, diperlukan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara langsung.

Dalam kerangka tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi lokal. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan ekonomi daerah. Secara normatif, UMKM juga telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang perlu didukung melalui kebijakan yang komprehensif. Namun, dalam praktiknya, UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, serta keterbatasan dalam adopsi teknologi dan digitalisasi.

Kota Langsa sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh menunjukkan potensi signifikan dalam pengembangan UMKM, dengan berbagai sektor unggulan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal. Perkembangan UMKM di kota ini tidak hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memperluas peluang kerja dan memperkuat basis ekonomi

masyarakat. Meskipun demikian, tantangan globalisasi dan persaingan pasar menuntut adanya strategi yang lebih adaptif dan inovatif dalam pengelolaan UMKM, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas produk, serta penguatan jaringan pasar.

Dalam konteks perumusan strategi, pendekatan analisis SWOT menjadi salah satu instrumen yang relevan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan ekonomi masyarakat (Pearce & Robinson, 2013). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang strategi yang lebih terarah dan berbasis pada kondisi empiris yang dihadapi. Namun demikian, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pemberdayaan sangat bergantung pada faktor koordinasi antar aktor, kualitas implementasi kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan akademik dan praktis untuk menganalisis secara mendalam bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, khususnya di Kota Langsa. Studi ini menjadi penting tidak hanya untuk memperkaya literatur mengenai pembangunan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga untuk memberikan kontribusi kebijakan yang lebih kontekstual dalam merancang model pemberdayaan ekonomi yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berada dalam ranah ekonomi publik dengan fokus pada strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM di Kota Langsa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap proses, dinamika, dan konteks implementasi kebijakan, tidak hanya pada hasil akhirnya.

Penelitian dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2025 dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pelaku UMKM sebagai aktor utama ekonomi lokal, sementara data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan literatur terkait. Populasi penelitian mencakup 25.690 UMKM di Kota Langsa, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan melalui teknik random sampling menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kombinasi teknik ini memungkinkan triangulasi data sehingga meningkatkan keandalan temuan. Analisis data menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman), yang kemudian dirumuskan ke dalam strategi SO, ST, WO, dan WT sebagai dasar penyusunan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara operasional, pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat, sedangkan strategi pemerintah dimaknai sebagai upaya terencana yang mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kota Langsa memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus instrumen utama dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah mencapai 25.690 unit usaha, UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sumber utama penyerapan tenaga kerja. Namun, potensi tersebut

belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan daya saing, terutama dalam aspek inovasi, akses permodalan, dan adaptasi terhadap teknologi digital.

Secara empiris, karakteristik responden memperlihatkan bahwa mayoritas pelaku UMKM berada pada usia produktif (26–30 tahun) dengan tingkat pendidikan didominasi lulusan SMA serta pendapatan rata-rata pada kisaran Rp2.000.000–Rp3.000.000. Temuan ini mengindikasikan bahwa UMKM di Kota Langsa memiliki basis tenaga kerja yang cukup potensial, namun masih membutuhkan penguatan kapasitas, khususnya dalam aspek manajerial dan digital.

Analisis SWOT Pemberdayaan Ekonomi UMKM Kota Langsa

Berikut adalah sintesis hasil analisis SWOT yang dirumuskan dari faktor internal dan eksternal:

Tabel 1. Analisis SWOT Pemberdayaan Ekonomi UMKM Kota Langsa

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<i>Opportunities</i> (Peluang)
1. Dukungan kebijakan pemerintah (pelatihan, pendampingan)	1. Potensi pariwisata sebagai pasar produk lokal
2. Infrastruktur (jalan, internet) relatif memadai	2. Perkembangan teknologi digital & e-commerce
3. Program pelatihan meningkatkan kapasitas UMKM	3. Permintaan produk khas daerah
<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)	<i>Threats</i> (Ancaman)
1. Keterbatasan akses modal	1. Persaingan produk luar & impor
2. Rendahnya literasi digital dan manajerial	2. Fluktuasi ekonomi dan daya beli
3. Minim inovasi produk	3. Ketergantungan pada SDA

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil perhitungan IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa baik faktor internal maupun eksternal berada pada kategori kuat (skor >3), sehingga posisi strategi berada pada Kuadran I (*growth-oriented strategy*). Artinya, kondisi ini relatif menguntungkan karena kekuatan internal dapat dimaksimalkan untuk menangkap peluang eksternal (Rangkuti, 2021).

Strategi Prioritas (SO Strategy)

Berdasarkan posisi tersebut, strategi yang paling relevan adalah strategi SO (*Strength–Opportunity*), yang berorientasi pada ekspansi dan penguatan kapasitas UMKM. Secara substantif, terdapat beberapa pola strategi yang muncul:

Pertama, penguatan kapasitas melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar. Temuan menunjukkan bahwa pelatihan yang difasilitasi pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas produk dan pemasaran. Hal ini sejalan dengan temuan Tuwisna *et al.* (2022) yang menegaskan bahwa digital marketing mampu memperkuat hubungan produsen–konsumen secara lebih personal.

Kedua, integrasi UMKM dengan sektor pariwisata. Produk lokal seperti keripik, terasi, dan kerajinan memiliki potensi besar sebagai komoditas wisata. Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai representasi identitas lokal. Temuan ini konsisten dengan studi Al Farisi *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam distribusi manfaat pembangunan ekonomi.

Ketiga, optimalisasi infrastruktur dan akses pasar. Infrastruktur jalan dan pasar modern terbukti memperluas distribusi produk lokal. Sugiarto dan Subroto (2019) menegaskan bahwa kualitas infrastruktur berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja.

Keempat, penguatan branding dan digitalisasi. Banyak UMKM masih lemah dalam aspek branding dan packaging, padahal faktor ini sangat menentukan daya saing produk. Dalam konteks

ini, Kotler dan Keller (2022) menekankan bahwa branding bukan sekadar identitas visual, tetapi juga strategi untuk membangun nilai dan loyalitas pelanggan. Penggunaan media sosial dan marketplace juga terbukti memperluas jangkauan pasar (Febriyantoro & Arisandi, 2018).

Kelima, inovasi berbasis keberlanjutan. Ketergantungan pada sumber daya alam mendorong perlunya inovasi bahan alternatif. Strategi ini tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Puspitasari & Handayani, 2023).

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, temuan ini menguatkan argumen bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kapasitas institusional dan strategi kebijakan yang kontekstual. Pemberdayaan bukan sekadar program, tetapi proses yang membutuhkan integrasi antara kebijakan, kapasitas aktor, dan dinamika pasar.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah di Kota Langsa sudah berada pada arah yang tepat, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek implementasi, khususnya dalam:

1. Konsistensi pelatihan berbasis kebutuhan pasar
2. Akses pembiayaan yang lebih inklusif
3. Digitalisasi UMKM secara sistematis
4. Penguatan ekosistem pemasaran lokal

Dengan demikian, pemberdayaan UMKM di Kota Langsa tidak hanya berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM secara umum telah menunjukkan arah yang tepat dan berbasis pada pemanfaatan kekuatan internal serta peluang eksternal yang tersedia.

UMKM terbukti memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi lokal, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dalam aspek akses permodalan, kapasitas manajerial, inovasi produk, dan literasi digital. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kondisi internal dan eksternal berada pada kategori kuat, sehingga menempatkan strategi pengembangan pada kuadran pertumbuhan (*growth-oriented strategy*), dengan penekanan pada strategi SO (*Strength-Opportunity*).

Implementasi strategi tersebut tercermin dalam berbagai program pemerintah, seperti pelatihan berbasis kebutuhan pasar, integrasi UMKM dengan sektor pariwisata, optimalisasi infrastruktur distribusi, penguatan branding dan pemasaran digital, serta dorongan inovasi produk berbasis keberlanjutan. Strategi-strategi ini secara empiris mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperkuat posisi ekonomi masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Meskipun demikian, efektivitas pemberdayaan ekonomi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi, khususnya dalam konsistensi program pelatihan, perluasan akses pembiayaan yang inklusif, akselerasi digitalisasi UMKM, serta pengembangan ekosistem pemasaran yang terintegrasi. Oleh karena itu, keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Langsa sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, kapasitas pelaku usaha, dan dinamika pasar.

Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Al Farisi, M., Rahman, A., & Putra, D. (2022). The role of SMEs in local economic development. *International Journal of Economics and Business Research*, 23(1), 55–70. <https://doi.org/10.1504/IJEER.2022.120000>
- Aziz, A., & Rahayu, S. (2020). Community empowerment and MSME development in Indonesia. *Journal of Development Studies*, 12(2), 45–60.
- Deepa Narayan. (2002). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook*. Washington, DC: World Bank.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada era masyarakat ekonomi ASEAN. *Jurnal Manajemen Dewantara*, 1(2), 61–76.
- Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, & Jean-Paul Fitoussi. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- Michael P. Todaro, & Stephen C. Smith. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2013). *Strategic management: Planning for domestic & global competition* (13th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Philip Kotler, & Kevin Lane Keller. (2022). *Marketing management* (16th ed.). Harlow, England: Pearson.
- Puspitasari, D., & Handayani, I. (2023). Kebijakan pemerintah dalam mendukung inovasi bahan alternatif oleh UMKM. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Daerah*, 10(1), 45–55.
- Rahardja, P. (2008). *Pengantar ilmu ekonomi: Mikroekonomi dan makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Rangkuti, F. (2021). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robert Chambers. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Sadono Sukirno. (1994). *Pengantar teori makro ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siwu, H. F. D. (2019). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 3878–3887.
- Suhendra, K., & Kadmasasmita, A. D. (2006). *Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2007). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Tumangkeng, S. (2018). Analisis potensi ekonomi di sektor dan subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1).
- Tuwisna, Lubis, A. R., Lubis, P. H., & Utami, S. (2022). The role of technology orientation to mediate market orientation and learning orientation on marketing performance. *Journal of Positive School Psychology*, 6(9), 1–10.